

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	KORAN TEMPO	B-4	29-08-2002

Dana untuk Air Bersih Turun Dibanding Tahun Lalu

JAKARTA — Anggota DPRD Syamsidar Siregar mempertanyakan penurunan anggaran untuk bidang sarana air bersih. Tahun lalu, pemerintah pusat mengucurkan anggaran sebesar Rp 7 miliar, namun saat ini cuma Rp 4,3 miliar. "Sebenarnya ada apa ini, padahal saat ini cukup banyak masyarakat yang membutuhkan air bersih," kata Syamsidar kemarin.

Menurut Syamsidar, yang berbicara dalam rapat kerja Komisi Keuangan DPRD dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta, ancaman kekeringan mengancam sebagian warga Ibu Kota. Hal ini terlihat dari sedikitnya pasokan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum bagi warga di Jakarta Utara dan Pusat.

Pekan lalu Wali Kota Jakarta Pusat Chosea Petra Lumbun menjelaskan

wilayah yang rawan kekeringan adalah Kecamatan Tanah Abang, Menteng, Cempaka Putih, dan Senen. "Untuk itu saya akan meminta bantuan kepada PAM agar mendistribusikan di wilayah kami yang rawan kekeringan," katanya. Di wilayah ini air bawah tanah semakin berkurang sehingga warga harus menggali pompa airnya minimal 24 meter.

Menurut Kepala Sub Dinas Pengusahaan Pertambangan dan Energi Haris Pindratno penurunan air tanah disebabkan karena bangunan dan sumur bor (*jet pump*) berdempetan.

Kepala Bappeda Ritola Tasmaya menjelaskan bahwa dana Rp 4,3 miliar dikucurkan melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM. Untuk tahun 2002, Pemerintah Provinsi DKI memperoleh dana seluruhnya sebesar Rp

45,68 miliar.

Ritola tidak dapat memberikan alasan terhadap gugatan Syamsidar. "Karena programnya adalah *top-down*, yang mengatur adalah pemerintah pusat, bukan oleh Pemerintah Provinsi DKI," kata Ritola. Menurut dia, kebijakan pemerintah pusat untuk mengatur dana dari program kompensasi kemungkinan disalurkan ke provinsi lain.

Program kompensasi untuk bidang sarana air bersih sebesar Rp 4,35 miliar itu, kata Ritola, dikucurkan langsung kepada para Wali Kota. Untuk tahun ini, anggaran tersebut telah disalurkan berupa pengadaan mobil-mobil tangki air, dan sumur pompa dalam. Fasilitas tersebut, kata Ritola, telah diberikan di beberapa wilayah Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

Selain untuk bidang sarana air bersih, dana kompensasi pemerintah pusat untuk DKI juga dikucurkan untuk pelayanan kesehatan sebesar Rp 11,64 miliar, pangan Rp 6,25 miliar. Lalu untuk bantuan sosial Rp 3,84 miliar, bidang pendidikan Rp 16 miliar, bidang UKM Rp 2,6 miliar, dan bidang pemberdayaan masyarakat pesisir sebesar Rp 950 juta. "Jumlah seluruhnya Rp 45,68 miliar, dan hampir seratus persennya sudah terserap."

Ketua Komisi Keuangan Anna Rudhiantiana berharap pada program kompensasi tahun depan, Pemerintah Provinsi DKI dapat diajak bicara untuk ikut menentukan anggaran. "Kalau perlu Pak Ritola *ngotot* agar yang mengajukan alokasi anggarannya adalah DKI," tutur Nazamuddin, anggota Komisi Keuangan lainnya.

● dimas.adityo